



Belum Diserahkan

Embung Datah II dan Bukit Bocor

Amlapura (Bali Post) -

Embung Datah II di Banjar Kedampal Desa Datah, Karangasem mengalami kebocoran. Akibatnya usai musim hujan air embung geomembran itu isi airnya kurang dari semeter. Sementara, proyek embung di Bukit, Kecamatan Karangasem juga mengalami kerusakan.

Hal itu dikatakan Kadis PU Karangasem Ir. Nyoman Sutirtayasa, Jumat (22/5) kemarin di Karangasem. Sutirtayasa asal Desa Jasri itu mengatakan, embung Datah II belum diserahkan kepada Pemkab Karangasem. Embung yang dibangun tahun anggaran 2014 oleh Balai Air Bali Penida (BABP) itu anggarannya Rp 8,2 miliar. "Embung itu belum diserahkan ke Pemkab dan masih menjadi milik BABP. Kami dari PU Karangasem belum berwenang memperbaikinya. Namun soal adanya

Wayan Ardika saat ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, karena bak penyalur dengan pipa penyalur *nyap-lir*, menyebabkan tak ada air mengalir dari pipa penyalur ke embung. Akibatnya pada musim hujan lalu begitu embung usai dibuat, isi air di bak besar penampung air hujan itu belum penuh. Embung hanya berisi air kurang dari semeter. "Tak ada aliran air dari pipa penyalur, saya sudah cek saat hujan lebat. Air yang ada di embung hanya air hujan dari

kerusakan kami sudah laporkan ke Balai Air Bali Penida," katanya.

Kerusakan bak raksasa dengan lapisan plastik itu selain pada sil pipa pembuangan atau penguras, juga pada plastik di bak diduga ada kebocoran. Akibatnya, volume air terus berkurang.

Selain itu, di bak penyalur di lereng Gunung Agung juga perlu diperbaiki karena posisi dengan pipa masih *nyap-lir* (melenceng).

Penjaga embung di lereng timur Gunung Agung itu langit," kata Ardika.

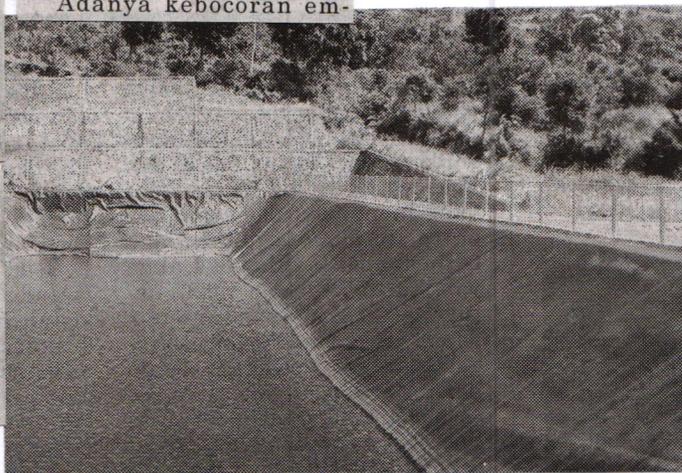
Ardika berharap pemilik embung itu lebih cepat memperbaikinya, agar tak mubazir. Soalnya, sudah ada proyek embung dengan menyerap anggaran besar, tetapi airnya tak ada dan warga terancam tetap krisis air bersih.

Selain proyek embung Datah II, kata Sutirtayasa, embung di Bukit di lereng Gunung Lempuyang juga masih ada kerusakan. Juga diduga karena ada kebocoran. Kedua kerusakan embung itu sudah dilaporkan ke BABP. "Saya sudah laporkan dan saya kira sudah ada respons dari Balai (BABP-red)," katanya.

Adanya kebocoran em-

bung Datah II dua pekan lalu disampaikan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg di depan tokoh masyarakat saat menggelar sosialisasi pembangunan di Balai Masyarakat Abang. Dari pantauan, sebenarnya kalau proyek embung itu berisi air penuh, lumayan bisa mengatasi krisis air warga di sekitarnya sampai puluhan KK di desa tandus itu. Embung di Datah II yang dianggarkan Rp 8,2 miliar,

kemampuan menampung air hujan 18.875 meter kubik (M3). Sementara, embung Bukit di lereng tenggara Bukit Lempuyang dengan anggaran sama volume tampung air hujan hanya 12.500 M3. (013)



BOCOR - Belum diserahkan proyek embung geomembran Datah II di lereng timur Gunung Agung, Karangasem bocor, sehingga air hujannya masih sedikit dari kedalaman embung sekitar empat meter.

Edisi : Sabtu, 23 Mei 2015

Hal : 12



Dugaan Penyimpangan Pembagian PHR Badung

Penyidik Periksa Sepuluh Saksi

Denpasar (Bali Post) -

Sejumlah pejabat setingkat kabag keuangan sudah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara khususnya pembagian pajak hotel dan restoran (PHR) Kabupaten Badung ke kabupaten/kota se-Bali. Hingga Jumat (22/5) kemarin, sudah sekitar sepuluh saksi yang diminta keterangan oleh penyidik Kejati Bali.

Salah seorang penyidik yang diminta konfirmasi siang kemarin, membenarkan bahwa pemeriksaan atas dugaan penyimpangan pembagian PHR sebagaimana disebutkan anggota Dewan Badung Nyoman Sentana, masih terus dilakukan. Bahkan, pejabat di atas kabag keuangan juga akan diminta keterangan, pekan depan. "Hingga saat ini sudah sekitar 10 saksi yang diperiksa. Nanti akan dipanggil saksi-saksi lain," sebut salah seorang penyidik, Made Tangkas. Hanya, Tangkas tidak berani memberikan keterangan lebih lanjut, dengan alasan kasusnya masih dalam proses.

Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan yang diminta konfirmasi, belum

mau memberikan keterangan karena dia sedang ada tugas keluar kota. Namun, menurut informasi lain yang didapat, bahwa pemeriksaan intensif dilakukan pada penggunaan pembagian PHR ke wilayah. Pasalnya, ada dugaan awal bahwa pembagian PHR dari Pemkab Badung digunakan di luar peruntukan, yakni pengembangan potensi wisata. Selain menggali informasi di wilayah, pihak pemberi dalam hal ini Pemkab Badung juga akan diperiksa. "Ya, pekan depan. Masih ada yang mengurus keuangan atau pendapatan yang akan diperiksa," sebut sumber di Kejati Bali, kemarin.

Kasus ini awalnya dibongkar anggota DPRD Badung, Nyoman Sentana. Setelah me-

eriksa pemberi informasi, penyidik awalnya memeriksa dua orang saksi. Saksi yang dipanggil adalah Kasubag Keuangan Bangli I Ketut Nurjana, S.E. dan Kasubag Keuangan Tabanan Wayan Arimbawa. Dua daerah tersebut menerima kucuran dana, yang sedianya untuk pengelolaan pengembangan pariwisata.

Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan yang diminta konfirmasi kala itu menyatakan memang benar ada pemeriksaan. Hanya, pria asal Yogyakarta itu tidak mau berkomentar banyak karena status kasus masih dalam proses penyelidikan. "Masih lidik," katanya kala itu. Pun soal hasil pemeriksaan Kasubag Keuangan Bangli dan Tabanan, belum ada pihak yang mau memberikan keterangan, dengan dalih bahwa perkara ini sedang menjadi bidikan dan dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

Sebelumnya, penyidik Kejati Bali menelusuri dugaan penyimpangan pembagian PHR Kabupaten Badung ke kabupaten/kota se-Bali. Ang-



Sambungan . . .

gota DPRD Badung Sentana sudah diperiksa atas mencuatnya dugaan penyimpangan tersebut. Tim jaksa penyidik yang memeriksa adalah Made Tangkas, Purwanti Murtiasih, Ketut Yasa dan Made Suasti Ariani.

Sebelumnya, anggota Dewan Badung itu dipanggil secara resmi oleh penyidik kejaksaan pimpinan Momock Bambang Sumniarso. Sentana memperlihatkan surat pemanggilan yang diterimanya. Surat pemanggilan tertanggal 30 April 2015 tersebut bernomor PK-90/P.1.5./Fd.1/04/2015 dan bersifat segera tersebut, memanggil Nyoman Sentana sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung Fraksi Gerindra. Pemanggilan tersebut untuk dimintai keterangan serta membawa dokumen-dokumen menyangkut adanya dugaan penyelewengan pembagian dana PHR Badung ke enam kabupaten/kota se-Bali.

Sentana menyampaikan, pembagian PHR Badung sebaiknya dihentikan saja karena kabupaten/kota yang

diberikan pembagian PHR yang didapat di Badung ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya. Bagi-bagi PHR yang sebenarnya untuk mendukung pariwisata di kabupaten/kota lainnya itu, ternyata malah digunakan keperluan lain yang bukan menunjang sarana dan prasarana pariwisata. "Pembagian yang diambil dari APBD Badung 2014 ini, karena tidak sesuai dengan peruntukannya, jelas merupakan penyimpangan. Hal itu juga tidak sesuai dengan surat kesepakatan bersama di luar perda, bahwa dana bagi hasil itu hanya untuk pariwisata," papar Sentana.

Jumlah nominal pembagian dana yang didapat dari PHR Badung tersebut, kata Sentana, masih didalami. Karena ada dugaan, ada selisih dalam pelaporan dalam pertanggungjawaban di APBD Badung tahun 2014. Menurutnya, besaran nominal yang disebutkan dibagi itu sekitar Rp 260 miliar lebih, ada dugaan selisih mencapai Rp 41 miliar. (kmb37)



Empat Proyek Gagal Tahun Lalu Lagi, Dianggarkan Rp 8 Miliar di APBD-P 2015

Amlapura (Bali Post)-

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karangasem harus menyiapkan anggaran Rp 8 miliar lagi untuk melanjutkan sejumlah proyek yang gagal diselesaikan tahun lalu. Anggaran sebesar itu telah dipasang dalam APBD Perubahan 2015, dan diharapkan bisa selesai tahun ini. Sebab, jika tidak segera diselesaikan, bisa menimbulkan kerusakan lebih parah.

Kepala Dinas PU Karangasem Nyoman Sutirtayasa, Jumat (22/5) kemarin, mengatakan ada empat proyek fisik yang menjadi prioritas diselesaikan tahun ini. Antara lain, proyek Dlundungan-Darmaji di Desa Ban, proyek jalan di Munti Gunung di Desa Tianyar Barat, proyek jalan lingkaran Pasar Agung Sebudi-Selat dan proyek jalan Juwuk-Teki di Desa Datah. "Penyelesaiannya kami prioritaskan yang empat ini dulu. Biar kerusakannya tidak tambah parah lagi. Kontraktor yang dulu sudah di-black list," kata Sutirtayasa. Sementara proyek fisik lain seperti proyek jalan Pelugon-Belong di Kubu, dan penyelesaian dua proyek pembangunan gedung dua kecamatan (Kecamatan Abang dan Sidemen) ditunda penyelesaiannya.

Ia menegaskan, sebenarnya anggarannya sudah ada, setelah anggarannya sebelumnya

menjadi silpa. Sehingga, tinggal dilakukan proses tender ulang. Sementara kontraktor sebelumnya meski sudah putus kontrak dan di black list, sebelum ada putusan LKPP (Lembaga Kebijakan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah) dan terbit dalam portal nasional, kontraktor yang bersangkutan, dikatakan masih bisa mengikuti proses tender. Kalaupun putusan turun di tengah perjalanan pascaproses tender, kontraktor yang bersangkutan dikatakan tidak akan terganggu dengan putusan LKPP itu. Namun, pihaknya masih mempelajari lebih jauh soal aturan terkait black list rekanan.

Tecat, ada empat rekanan yang kena black list dari pemerintah daerah. Antara lain untuk proyek di Dlundungan-Darmaji oleh PT Agung Sarwa Luwih, proyek Jalan Munti Gunung menuju Pura Puseh setempat oleh CV Wahyu Karya Perdana, proyek Jalan Lingkaran Pasar Agung menuju Sebudi oleh CV Sari Darma. Terakhir, pengerjaan Jalan Banjar Juwuk-Teki oleh CV Bali Indonesia Inspratio (CV BII). Ada juga rekanan yang mengerjakan proyek Jalan Pelugon-Belong, Kubu oleh CV Tri Jaya Karya. "Sesuai arahan bapak bupati, yang sudah menjadi prioritas dalam APBD Perubahan, tahun ini tidak boleh sampai gagal lagi," jelasnya. (kmb31)

Edisi : Sabtu, 23 Mei 2015

Hal : 12



GELEDAH - Suasana pengeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan di kantor Dinas DKP Tabanan terkait kasus dugaan pemerasan.

Kasus CPNS

Puluhan Alat Bukti Disita dari Tiga Tempat

Tabanan (Bali Post) -

Pengeledahan yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabanan di tiga tempat sekaligus, Kamis (21/5) membuahkan hasil. Setidaknya dari hasil pengeledahan di kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta rumah tersangka JG, Kajari menyita puluhan dokumen dan alat bukti terkait dugaan pemerasan CPNS di lingkungan DKP Tabanan.

Di DKP Tabanan, tim kejaksaan yang dipimpin langsung Kasi Pidsus Fatur-ochman memeriksa satu per satu berkas yang ada di ruangan tersangka CD yang menjabat Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP. Tim juga memeriksa ruang Kabid yang sebelumnya dijabat oleh tersangka JG sebelum dimutasi ke Dinas Naker-

trans. Di DKP tim penyidik menyita setidaknya 23 buah dokumen penting yang diduga terkait kasus yang menjerat tersangka JG.

Sementara di Dinas Nakertrans tempat JG menjabat Kabid Bidang Promosi dan Pengendalian, petugas juga memeriksa ruang kerja yang bersangkutan. Saat pengeledahan JG sedang berada

di ruangan. Satu per satu berkas, catatan, buku agenda termasuk telepon seluler JG tak luput dari pemeriksaan tim jaksa. Bahkan petugas menyita empat barang bukti atau alat bukti.

Tak hanya di dua kantor dinas tersebut, tim penyidik yang bertugas menggeledah rumah JG yang berlokasi di depan Rindam IX/Udayana,

Edisi : Sabtu, 23 Mei 2015

Hal : 19



Sambungan - - -

Kediri juga berhasil menyita enam buah dokumen penting yang selanjutnya dibawa ke kejaksaan. "Barang bukti yang diamankan berupa surat, agenda dan kwitansi," jelas Fatur Rohman.

Puluhan dokumen dan alat bukti tersebut akan digunakan untuk mencegah hilangnya barang bukti atau alat bukti, selain juga untuk mendukung berkas pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya sampai penetapan dua tersangka, yakni JG dan CD. "Kami akan melengkapi data agar berkas lengkap," ucapnya.

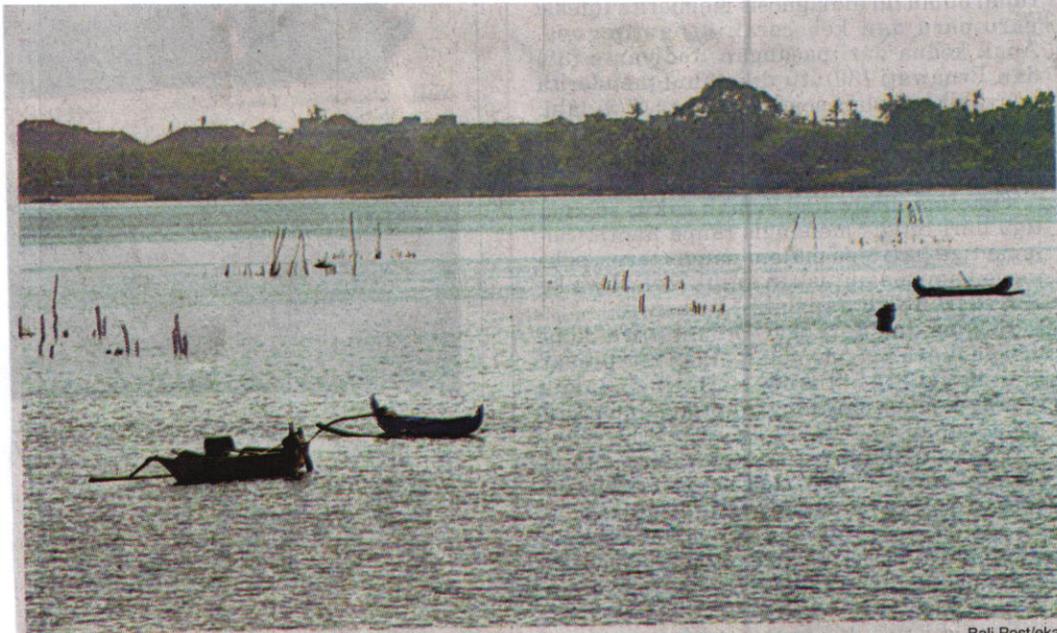
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Tabanan bekerja keras dalam menangani kasus dugaan pemerasan CPNS di lingkungan DKP Tabanan. Kasus ini mencuat awal Desember 2014 berawal dari pengakuan salah satu staf DKP golongan 1 yang dimintai uang sekitar Rp 60 juta jika ingin mendapatkan SK CPNS-nya. Padahal untuk mendapatkan SK yang merupakan hak para pegawai itu tidak seharusnya membayar. "Kami akan melengkapi data agar berkas lengkap," ucapnya. (kmb28)

Edisi : Sabtu, 23 Mei 2015

Hal : 19



Rencana Reklamasi Teluk Benoa ✓ **Nelayan Kelan Resah**



Bali Post/eka

NELAYAN - Beberapa nelayan tengah mencari ikan di Teluk Benoa, Kuta Selatan. Rencana reklamasi menimbulkan keresahan nelayan, terancam hilangnya lokasi mereka mencari nafkah.

Rencana investor mereklamasi Teluk Benoa melahirkan keresahan. Di tengah pro-kontra rencana pengurangan laut sekitar 700 hektar tersebut, ternyata membuat gundah nelayan di Desa Kelan. Para nelayan ketakutan, gundah terkait areal "sumber rezekinya" terancam sirna. Lalu ke mana nelayan mengais rezeki untuk hidup mereka?

ADA tanda tanya besar berkecamuk di hati para nelayan yang selalu melaut di Teluk Benoa. Rencana reklamasi wilayah itu menimbulkan ketidakpastian bagi mereka dalam mengembangkan usaha perikanan. Nelayan di Desa Adat Kelan bahkan merasa dilecehkan lantaran pemerintah dan pihak investor terkesan mengabaikan potensi bahari Teluk Benoa yang selama ini menjadi salah satu tumpuan perekonomian masyarakat.

Ketua Kelompok Nelayan Tanjung Sari I Nyoman Nuada, Kamis (21/5) mengungkapkan, sejak bergulirnya rencana reklamasi Teluk Benoa, nelayan merasa terombang-ambing tak berani beraktivitas mengembangkan usaha. Nelayan tak lagi bisa bebas menggeluti profesi yang selama ini telah memberikan kehidupan bagi mereka.

Hal. 27
Budi Daya

Edisi : Sabtu, 23 Mei 2015

Hal : 1



Sambungan - -

Budi Daya

Dari Hal. 1

Menurutnya, selain perikanan tangkap, nelayan juga bergelut di usaha perikanan budi daya di kawasan Teluk Benoa. Di sektor perikanan tangkap, pihaknya sudah merasa terganggu dengan rencana reklamasi. Bahkan, Nuada sendiri mengaku terpaksa "mengungsikan" perahunya ke pantai barat Kelan yang berlokasi di dekat Bandara Ngurah Rai karena khawatir reklamasi bergulir.

Di sektor budi daya juga demikian. Nelayan selama ini menggunakan keramba jaring apung untuk membudidayakan beberapa jenis ikan di pantai timur atau kawasan Teluk Benoa di sebelah barat jalan tol. Sayangnya, ketika polemik reklamasi bergulir dan tak ada kepastian dibatalkan, nelayan terpaksa mengurungkan niat menambah jumlah keramba budi daya. "Sekarang nasib kami ngambang. Kapan terjadi (reklamasi - red). Kalau

misalnya sekarang kita kembangkan budi daya, kita takut rugi karena itu modal panas," keluhnya.

Dikatakannya, potensi perikanan di Teluk Benoa sebenarnya sangat menjanjikan. Bahkan jauh lebih menjanjikan ketimbang bekerja di pulau baru hasil reklamasi. Memang reklamasi bisa menyerap tenaga kerja, akan tetapi banyak hal yang justru dikorbankan, salah satunya kenyamanan masyarakat. "Apakah orang Bali harus ikuti arus pariwisata dan harus bekerja di sektor itu. Padahal jadi nelayan sebenarnya sangat menjanjikan dan nyaman. Ingat, waktu Bom Bali yang tetap kuat kan nelayan dan pertanian," kritiknya.

Sementara itu, munculnya dukungan dari sejumlah bendesa, mantan bendesa dan tokoh masyarakat terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa kini masyarakat mempertanyakan. Bendesa Adat Kelan I Made Sugita menyatakan dukungan

yang dilayangkan melalui surat ke Presiden Jokowi itu tidak memiliki legitimasi di masyarakat. Pasalnya, dukungan hanya atas nama pribadi dan tidak berdasarkan hasil *paruman* atau musyawarah di masyarakat.

"Harusnya dibawa ke *paruman*. Di era sekarang ini jangan sampai masyarakat *negative thinking* ke *prajuru* desa adat. Jangan sampai ada kesan ada sesuatu dengan *prajuru* sampai-sampai secara pribadi menyatakan dukungan terhadap reklamasi," ujarnya.

Dia mencontohkan, masyarakat Desa Adat Kelan sudah sangat jelas menolak reklamasi Teluk Benoa. Hal itu sudah diputuskan lewat *paruman* desa adat. "*Paruman* itu adalah dasar melegitimasi sikap desa adat kami atas rencana reklamasi Teluk Benoa. Ini juga agar tidak ada konflik kepentingan di antara komponen masyarakat Kelan," tegasnya. (ded)

Edisi : Sabtu, 23 Mei 2015

Hal : 1



Soal Pengelolaan Pasar Sangsit

Tim Desa Setuju Setor Keuntungan 30 Persen

Singaraja (Bali Post) -

Proses panjang untuk menentukan setoran keuntungan pengelolaan Pasar Sangsit, kini berakhir. Menyusul tim desa telah menyepakati penyetoran keuntungan sebesar 30 persen kepada pemerintah daerah. Sebelumnya, tim desa enggan menyetorkan keuntungan yang diperolehnya ke pemerintah. Kemudian melunak menjadi 20 persen. Namun, karena berdasarkan aturan yang ada, pengelola pasar harus menyetorkan 20 persen keuntungan yang diperoleh, maka tim desa akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan keinginannya itu.

Informasi dikumpulkan di lapangan, Jumat (22/5) kemarin, menyebutkan, sikap yang tidak lagi ngotot untuk menyetorkan pembagian keuntungan sebesar 20 persen ini mereda setelah tim Pemkab, Komisi III DPRD Buleleng melakukan pendekatan kepada tim desa. Tim Pemkab bersama dewan kembali menegaskan bahwa syarat untuk diberikan hak pengelolaan pasar itu desa wajib menyetorkan pembagian keuntungannya kepada pemerintah daerah sebesar 30 persen dari laba bersih. Persentase keuntungan bagi hasil itu menjadi hal yang baku dan berlaku ketika pasar itu dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar

Buleleng.

Dari hasil pendekatan yang berjalan alot tersebut, tim desa akhirnya bersedia menerima tawaran persentase setoran pembagian keuntungan sebesar 30 persen. Sedangkan 70 persen lagi sepenuhnya merupakan hak pengelola dalam hal ini Desa Sangsit Kecamatan Sawan. Formula 30 berbanding 70 persen ini diambilkan dari keuntungan bersih atau sisa hasil usaha (SHU -red). Alasan mengapa tim desa menerima tawaran tersebut karena jika terus berkuat masalah *sharing* keuntungan dikawatirkan proses penyerahan pengelolaan pasar yang sudah dinanti-nanti oleh desa

dan pedagang justru akan mandek dan kemungkinan buruk akan menjadi polemik berkepanjangan.

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemkab Buleleng Ketut Suparto ketika dimintai konfirmasi kemarin, membenarkan kalau tim desa telah siap menyetorkan keuntungan 30 persen. Kata dia, sikap yang ditunjukkan tim desa setelah tim Pemkab bersama Komisi III DPRD bersama Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagprin) Buleleng melakukan pendekatan dengan tim desa.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Desa Sangsit mengajukan permoho-



Ketut Suparto



I Wayan Wisara

nan untuk mengelola sendiri Pasar Sangsit yang selama ini dikelola oleh PD Pasar Buleleng. Permohonan ini dipicu pascarevitalisasi pasar tersebut. Pedagang kebanyakan merupakan warga asli namun diperlakukan seperti pedagang yang berjualan di tempat orang lain. Lapak maupun

kios yang mereka sewa sebelum pasar direvitalisasi cukup luas, namun setelah itu justru dibatasi hanya beberapa meter. Selain itu, pedagang juga dikenakan cukai yang dirasa memberatkan karena Pasar Sangsit hanya buka dari pukul 03.30 wita hingga pukul 10.00 wita. (kmb38)

Edisi : Sabtu, 23 Mei 2015

Hal : 10



Tertibkan Galian C Bodong Kapolda Belum Bersikap Tegas

Amlapura (Bali Post) -

Sikap Kapolda Bali Irjen Pol. Ronny F. Sompie terhadap persoalan maraknya galian C bodong di Kabupaten Karangasem, terlihat *gabeng* atau tidak jelas. Meski banyak kalangan sudah menyoroti maraknya galian C ilegal dan meminta pihak kepolisian bertindak tegas, Kapolda tidak bisa memberikan sikap tegas, berupa upaya penertiban. Justru dia terkesan menyalahkan pemerintah daerah karena tidak bisa mengantisipasi maraknya galian C dari hulu yakni upaya pencegahan sebelum pelanggaran itu terjadi melalui proses perizinan.

Desakan agar pihak kepolisian melakukan penertiban, sempat mengemuka dalam sarasehan Forum Sekar (Pasemetonan Karangasem) di Gedung DPRD Karangasem belum lama ini. Di mana, galian C bodong dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang parah, bila tidak dikontrol pelaksanaan penggaliannya. Ketua Dewan Pakar Forum Sekar, Nyoman Suparta, saat itu mengatakan penegakan hukumnya harus diperkuat, baik melalui kepolisian maupun melalui perbaikan perda. Ia mengaku prihatin, perda galian C masih menetapkan aturan hingga ketinggian 500 meter. Tetapi, galian C di kawasan Kecamatan Selat sudah melebihi 500 meter. Faktanya, masih dilakukan penggalian liar secara tidak terkendali, karena para penggali tidak mengantongi izin.

"Penegakan hukum oleh pihak kepolisian harus lebih tegas. Perda selanjutnya agar direvisi, untuk mewadahi aturan dasar dan kepentingan masyarakat Karangasem," tegasnya. Kapolda Ronny, Jumat (22/5) kemarin, saat kunjungan kerja ke Mapolres Karangasem menanggapi masalah galian C sebagai persoalan bersama, bukan sema-

ta-mata tugas kepolisian. Ia justru menyoroti pemerintah daerah yang berkompoten memberikan izin, tentu harus memberikan perhatian dengan bersikap lebih tegas, agar tidak semakin liar. Jika sudah liar, ia menyadari akan semakin mengganggu tatanan lingkungan. Lalu, ketika pelanggaran sudah terjadi, kenapa tidak melakukan upaya penertiban?

Kapolda menyadari yang liar memang harus ditertibkan. Dan, upaya penegakan hukum dikatakan hanya bisa dilakukan jajaran Polri. Hanya, Kapolda mengaku lebih mengedepankan upaya pencegahan, daripada penertiban. Nah, upaya pencegahan itu hulunya dari pemerintah daerah. Sehingga, ia menegaskan masalah galian C liar harus ditangani bersama-sama, agar lebih membuahkan hasil. "Karena di hulunya bisa kita cegah, penanganan dari hulu saya kira lebih efektif daripada penanganannya di hilir (penertiban oleh polisi)," tegasnya.

Sehingga, selama pemerintah daerah tidak serius melakukan penertiban dari hulu, maka penanganan dari hilir oleh pihak kepolisian juga akan sia-sia. Meski demikian, polisi saat ini hanya berupaya untuk mengajak masyarakat yang melakukan penggalian atau pertambangan secara liar untuk mengajukan izinnya. Karena dengan cara begitu, mereka diajak untuk tertib administrasi. Selain itu, kapolda juga melihat keberadaan Babinsa, Babinkamtibmas, kepala desa hingga bendesa adat, bisa menjadi perpanjangan tangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Dia berharap, dampak berupa kerusakan lingkungan harus bisa dipahami bersama oleh masyarakat. Karena itu mereka mesti diarahkan agar melakukan aktivitas yang tidak merugikan masa depan lingkungan. (kmb31)